**Penerapan *Community Based Tourism* (Pariwisata Berbasis Masyarakat) dalam Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Pulau Semambu,**

**Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan**

***Community Based Tourism in the Management and Development of Semambu Island Tourism Village, North Indralaya District, Ogan Ilir Regency, South Sumatra***

**Ulfa Sevia Azni¹, Alfitri Alfitri²**

¹Mahasiswa Magister Pengelolaan Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya

*(email: ulseaz97@gmail.com)*

²Guru Besar Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

***ABSTRAK***

*Semambu Island Tourism Village is a tourist village that is included in the category of tourist villages invited by people who have high enthusiasm for managing the tourist attractions in them. This research uses qualitative research with descriptive research type. Sampling is done by purposive sampling technique by collecting data which is done by in-depth interviews, observation, and administration. This study aims to describe the application of CBT (Community Based Tourism) in the management of Semambu Island Tourism Village, describe the role of various stakeholders, and understand the potential and development in the management and development of Semambu Island Tourism Village in North Indralaya District, Ogan Ilir Regency, South Sumatra. The results showed the concept of CBT applied to achieve tourism planning in Semambu Island Tourism Village was applied in the form of local community participation, the establishment of a tourism protection village, management of tourist attraction with an environmental perspective and the creation of community business activities. Management of tourist attractions in the Semambu Island Village emerged from the discovery of local communities. With several considerations concerning the development and development of Semambu Island Tourism Village, among others, still need funding assistance from the local government, providing facilities and infrastructure as a tourist attraction, increasing the number of tourists who manage a limited crew, and the still limited ideas to add complementary businesses and Semambu Island Tourism Village.*

***Keyword****: Community Based Tourism, Community Empowerment, Tourism Village, Semambu Island Tourism Village*

**ABSTRAK**

Desa Wisata Pulau Semambu merupakan desa wisata rintisan yang masuk dalam kategori desa wisata berpotensi yang masyarakatnya memiliki antusias tinggi dalam mengelola daya tarik wisata yang ada di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan CBT (*Community Based Tourism*) dalam pengelolaan Desa Wisata Pulau Semambu, mendeskripsikan peran berbagai stakeholders, serta mengetahui potensi dan kendala dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep CBT yang diterapkan untuk mencapai pengelolaan pariwisata Desa Wisata Pulau Semambu diaplikasikan dalam bentuk partisipasi masyarakat lokal, pembentukan kelembagaan desa wisata, pengelolaan daya tarik wisata berwawasan lingkungan dan terciptanya kegiatan usaha masyarakat. Pengelolaan daya tarik wisata di Desa Pulau Semambu muncul dari inisiatif masyarakat lokal. Adapun beberapa kendala yang dialami dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Pulau Semambu antara lain masih kurangnya bantuan dana dari pemerintah lokal, kurangnya sarana dan prasarana sebagai daya tarik wisata, kurangnya pengelolaan wisata dikarenakan jumlah crew yang terbatas, serta masih terbatasnya ide untuk menambah bisnis pelengkap dan penunjang pariwisata Desa Wisata Pulau Semambu.

***Kata kunci****: Community Based Tourism, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Wisata, Desa Wisata Pulau Semambu*

**PENDAHULUAN**

Peningkatan dan pemerataan pembangunan dan perekonomian berbasis masyarakat di desa merupakan cita-cita seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini, desa tidak lagi menjadi penonton dalam pembangunan, namun sudah menjadi pelaku dalam kegiatan pembangunan tersebut. Begitu banyak potensi di desa yang bisa di kelola dan dikembangkan oleh pemerintah desa bersama masyarakat, salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah desa wisata. Dalam skala wilayah yang lebih sempit, pemerintah Indonesia menginisiasi pengembangan potensi wisata di tingkat desa, sepanjang potensi desa tersebut layak dijual serta sebagai pemicu gerak roda perekonomian wilayah setempat [1].

Desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan dari suasana yang mencerminkan keaslian dari pedesaaan dimulai dari sosial budaya, adat istiadat, keseharian, serta memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas [2]. Kawasan tersebut dapat dilihat dari penduduk yang relatif masih memiliki tradisi dan budaya yang masih asli, serta mempunyai faktor pendukung seperti makanan, sistem pertanian, sistem sosial, dan faktor lingkungan yang masih terjaga [3].

Desa wisata juga merupakan pengembangan suatu wilayah desa yang pada dasarnya tidak merubah apa yang sudah ada, namun cenderung kepada pengembangan potensi yang ada di desa tersebut dengan melakukan pemanfaatan kemampuan unsur- unsur yang ada sebagai atribut produk wisata dalam skala yang kecil yang menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata serta mampu menyediakan dan memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukung [4]

Salah satu hal yang menarik dalam menciptakan suatu kawasan desa wisata ialah berdasarkan kebudayaan yang terdapat pada kawasan tersebut. Kondisi inilah yang mendasari terciptanya kegiatan pariwisata di suatu desa karena kekhasan budaya masyarakat yang mendiami daerah tersebut. Kondisi tersebut antara lain, (i) Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi. (ii) Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata. (iii) Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya. (iv) Keamanan di desa tersebut terjamin. (v) Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai. (vi) Beriklim sejuk atau dingin. (vii) dan berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas [5].

Masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata [6]. Mulai dari kerangka perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan kepariwisataan, dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan, maka setiap upaya atau program pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan posisi, potensi, dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan [7]. Selain itu dalam pelaksanaan tersebut haruslah mengikuti aturan bersama yang harus dijalankan sesuai dengan keyakinan yang sudah dianut oleh masyarakat setempat [8].

Konsep yang menjelaskan peranan masyarakat dalam pembangunan pariwisata adalah *Community Based Tourism* (CBT) [9]. CBT merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung pada industri pariwisata [10]. Menuru Weaver, CBT merupakan sebuah bentuk pariwisata alternatif [11]. Konsep ini diharapkan mampu menjadi alternatif wisata massal yang kebanyakan menimbulkan penurunan bahkan perusakan atas lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan budaya dan sosial.

Operasional CBT meliputi beberapa prinsip di antaranya mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat terhadap pariwisata; melibatkan anggota masyarakat dari awal dalam semua aspek; menggalakkan kebanggaan masyarakat; meningkatkan kualitas hidup; menjamin kelestarian lingkungan; mempertahankan karakter unik dan budaya daerah setempat; pembelajaran lintas budaya; menghormati perbedaan budaya dan menghargai martabat manusia; mendistribusikan manfaat secara merata di antara anggota masyarakat; kontribusi pendapatan untuk kegiatan masyarakat.

Konsep *CBT* merupakan dasar dari *sustainable tourism development* yang menegaskan bahwa masyarakat bukan lagi menjadi objek pembangunan akan tetapi sebagai penentu pembangunan itu sendiri [12]. Sejalan dengan itu, menurut Hudson dan Timothy, pariwisata berbasis masyarakat atau CBT merupakan pelibatan masyarakat dengan kepastian manfaat. yang diperoleh masyarakat melalui upaya perencanaan dan pendampingan yang membela masyarakat lokal, serta kelompok lain yang memiliki antusias atau minat kepada kepariwisataan, dengan pengelolaan pariwisata yang memberi peluang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat [7].

Salah satu desa yang masyarakatnya memiliki antusias tinggi untuk mengembangkan desanya melalui sektor pariwisata adalah Desa Pulau Semambu. Antusiasme tersebut awalnya berasal dari pemuda-pemudi desa setempat. Mereka berkeinginan memajukan desa dalam sektor wisata yang juga diimbangi dengan potensi alam yang dimiliki oleh desa. Maka dari itu terciptalah Desa Wisata Pulau Semambu.

Desa ini terletak di Dusun III Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Akses jalan menuju Desa Pulau Semambu ini tidak terlalu sulit, Dari Pusat Kota Palembang, pengunjung bisa menempuh jalan menuju Indralaya ± 50 menit dan posisi Desa Wisata Pulau Semambu tepat di persimpangan sebelah kanan yang bersebelahan dengan SPBU.

Selanjutnya setelah sampai, pengunjung akan menikmati pemandangan yang cukup mengesankan, meskipun masih dalam proses pembenahan. Namun, nuansa alam bisa membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di tempat tersebut. Sarana listrik sudah ada dan telekomunikasi sudah memenuhi syarat sebagai penunjang aktifitas Desa Pulau Semambu. Secara umum beberapa kelemahannya adalah sarana dan prasarana masih kurang dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Supramin, Kepala Desa Pulau Semambu, desa ini mempunyai luas sekitar 1200 ha yang terdapat di dalamnya lima dusun dan sepuluh Rukun Tetangga (RT).

Desa Wisata Pulau Semambu dapat dikatakan desa wisata alam yang merupakan hasil kreatifitas para pemuda desa setempat. Berawal dari pengalaman berwisata ke daerah lain seperti Bandung dan Bogor, mereka menyadari desanya yang memiliki potensi sumber daya alam yang baik, maka terbentuklah inisiatif untuk menjadikan Desa Pulau Semambu menjadi destinasi wisata yang menarik. Desa Wisata ini dikelola oleh sejumlah pemuda desa setempat yang dikoordinasikan oleh Kodrat (29). Selanjutnya juga diawasi oleh Kepala Desa dan BUMDes setempat. Fasilitas yang dapat ditemui di Desa Wisata Pulau Semambu meliputi Flying fox, kegiatan outbound, memberi makan ternak dan ikan, memetik buah dan sayur, tempat pemancingan ikan, Mushola serta tempat parkir.

Desa Wisata Pulau Semambu dibentuk sejak November 2017 yang dibangun diatas izin lahan warga seluas satu hektar atas nama H. Nasrul Shah. Pada awal dibangun, Kodrat dan kawan-kawan meminta persetujuan yang diketahui oleh Kepala Desa untuk memakai lahan tersebut guna dijadikan wisata Desa Pulau Semambu. Selanjutnya Kodrat beserta pemuda-pemuda dan masyarakat setempat membersihkan lahan dan mulai berbenah menjadikan lahan tersebut menjadi sebuah wahana wisata alam dan langsung diresmikan oleh Kepala Desa setempat.



**Gambar 1. Logo Desa Wisata Pulau Semambu.**

Desa Wisata Pulau Semambu menyediakan paket-paket hiburan yang di dalamnya ada permainan, flying fox, outbound, makan siang, coffe break, memetik sayur dan buah, memancing ikan, memberi makan ternak sesuai permintaan paket program dari pengunjung. Adapun paket program yang ditawarkan Desa Wisata Pulau Semambu antara lain program outbound dengan tarif Rp 250.000/orang dimana sudah termasuk paket outbound, makan siang, *coffe break*, wisata petik sayur, wisata petik buah, memancing dan dokumentasi.

**Gambar 2. Alur Pelaksanaan Paket Wisata**

**Desa Pulau Semambu**

Kodrat sebagai pengelola juga menyebutkan bahwa Desa Wisata Pulau Semambu siap menyediakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Misalkan pengunjung ingin membuat acara bersama nantinya crew akan menyiapkan panggung beserta musik lengkap dengan tenda dan kursi. Jika pengunjung juga mau berkemah, nantinya crew juga akan menyiapkan listrik dan fasilitas lainnya tergantung kebutuhan pengunjung. Namun untuk biaya dan tiket masuk, Desa Wisata Pulau Semambu belum menerapkan tarif, hal tersebut dikarenakan para crew masih menyadari keterbatasan wahana permainan.

Dalam memperkenalkan Desa Wisata Pulau Semambu, para pengelola serta masyarakat pada awalnya memperkenalkan desa dengan mengunjungi berbagai sekolah-sekolah seperti Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama, karena pada awalnya memang target Desa Wisata Pulau Semambu adalah anak-anak. Namun seiring berjalannya waktu, Desa Wisata Pulau Semambu semakin dikenal dan telah banyak dikunjungi oleh wisatawan. Berdasarkan hasil wawancara, pengunjung Desa Wisata Pulau Semambu pun sudah mencapai 1500 orang sejak awal dibukanya desa wisata tersebut pada Februari 2018 hingga November 2019 saat ini. Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran sosial media seperti instagram dan facebook. Desa Pulau Semambu mempunyai satu akun media sosial instagram dan facebook yang digunakan sebagai ajang promosi Desa Wisata Pulau Semambu.

Maka dari itu, peneliti bertujuan untuk mengkaji pengembangan Desa Wisata Pulau Semambu yang berkonsep pada CBT. Dengan harapan agar Desa Pulau Semambu dapat menjadi pemicu tumbuhnya kerjasama yang baik antar masyarakat serta munculnya bisnis-bisnis berbasis sumber daya lokal yang tentunya dikelola oleh masyarakat sekitar.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai tujuan yang akan diteliti [13]. Serta teknik pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* (secara sengaja), Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan penerapan CBT dalam pengelolaan Desa Wisata Pulau Semambu, serta mendeskripsikan peran berbagai stakeholders dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Penerapan CBT dalam Pengelolaan Desa Wisata Pulau Semambu**
   1. **Partisipasi Masyarakat Lokal**

Istilah partisipasi berasal dari bahasa Latin “*partisipare*” yang mempunyai arti “mengambil bagian” atau “turut serta”. Partisipasi diartikan sebagai interaksi antara dua kelompok, yaitu kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (nonelite) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite) [14]

Sementara menurut Sumarto, partisipasi memiliki makna suatu proses ketika warga (sebagai individu, kelompok sosial dan organisasi) mengambil peran serta iku mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung berdampak pada kehidupan [15]

Sedangkan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan, keterlibatan, dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, dimulai dari gagasan perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan evaluasi [16]. Dalam mengembangkan desa wisata, partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci agar pengembangan desa wisata berjalan dengan tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja karena masyarakat lokal merupakan orang pertama yang mengetahui tentang kondisi daerahnya daripada orang yang berasal dari luar daerah.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat lokal sangat diperlukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan hingga akhir yaitu evaluasi kerja sehingga timbul kesadaran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengembangkan daya tarik wisata di daerahnya masing-masing. Dalam pengembangan desa wisata tersebut masyarakat tersebut memegang peranan sebagai subjek dan objek yang memiliki letak yang sangat penting dalam keberlanjutan pembangunan. Dimana dalam pembangunan pariwisata dapat dikatakan hampir seluruhnya menyentuh

kehidupan masyarakat yang berada didalamnya.

Partisipasi yang diterapkan dalam perintisan Desa Wisata Pulau Semambu ini menggunakan partisipasi masyarakat secara spontan (*spontaneous* *participation*). Ciri-ciri partisipasi spontan ini bahwa inisiatif berasal dari masyarakat (*bottom up*). Hal ini dibuktikan pada tahap awal mula sekelompok pemuda dan masyarakat Desa Wisata Pulau Semambu yang berinisiatif serta menyadari bahwa Desa Pulau Semambu memiliki peluang untuk dikembangkan sektor pariwisatanya. Partisipasi spontan juga ditandai dengan masyarakat terlibat sebagai pembuat keputusan yang dibuktikan dalam pembentukan kelembagaan dan pengelolaan daya tarik wisata yang ada, seluruh komponen masyarakat Desa Wisata Pulau Semambu terlibat dan punya peran masing-masing sesuai kapasitasnya.

****

**Gambar 3. Masyarakat bergotong-royong di Desa Wisata Pulau Semambu.**

Pada gambar tersebut terlihat masyarakat beserta pemuda di Desa Wisata Pulau Semambu membersihkan lahan yang sudah diizinkan untuk dijadikan wisata desa. Mereka bergotong royong dalam proses awal pembangunan Desa Wisata Pulau Semambu tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat juga terlihat pada kerjasama dalam membuat lintasan flying fox, serta ikut dalam promosi Desa Wisata Pulau Semambu ke sekolah-sekolah maupun di media sosial masing-masing.

* 1. **Kelembagaan Desa Wisata**

Dalam konteks pariwisata, kelembagaan merupakan komponen yang penting dalam menunjang keberhasilan pariwisata. Kelembagaan juga berperan dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat dalam upaya peningkatan potensi pariwisata. Selain itu, urgensi keberadaan kelembagaan dalam bidang pariwisata berperan sebagai penggerak dalam memfasilitasi, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata [17].

Kelembagaan Desa Wisata Pulau Semambu telah menjalankan tugasnya berdasarkan fungsi kepemimpinan, kemitraan internal, pengembangan daya tarik wisata dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan CBT, Secara kelembagaan, pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata Pulau Semambu dilakukan oleh sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Pulau Semambu

Secara umum, pemerintah Desa Pulau Semambu bertugas dalam membangun relasi kepada pemerinah dan swasa serta masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam membangun Desa Wisata Pulau Semambu, baik dari segi pengamanan, pendanaan, serta kegiatan promosi.

1. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Pokdarwis terdiri dari para pemuda dan masyarakat yang mencetuskan ide pembangunan Desa Wisata Pulau Semambu. Pokdarwis atau biasa yang disebut *crew* berjumlah 15 orang. Secara umum, pokdarwis ini selaku pengelola langsung obyek wisata dimana harus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat lokal, terutama terkait dengan kebijakan, pengelolaan, maupun sinergi dengan masyarakat lokal.

1. Pasar/Pengunjung

Pengunjung Desa Wisata Pulau Semambu bisa perorangan, kelompok, maupun lembaga. Sehingga diperlukan kajian potensi pasar dalam rangka promosi tepat sasaran dan kebutuhan jasa rekreasi yang dibeli.

1. Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Swasta

Peran pemerintah sebagai dalam membuat kebijakan seharusnya transparan dan adil dalam rangka kebijakan publik yang memenuhi standar dalam alam demokrasi. Arahan dan pendanaan masih dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata. Perguruan tinggi seharusnya juga membantu dan memfasilitasi kemampuan dan skill atau keterampilan untuk mengaplikasikan ilmunya sebagai wujud tugas Tri Darma Perguruan Tinggi. Pihak swasta juga dibutuhkan terutama dalam pendanaan, karena sangat berat kalau pendanaan hanya mengharapkan dari APBN/APBD. Sudah barang tentu sinergi dengan pihak swasta juga mempertimbangkan *win-win strategy*.

**Gambar 4. Kelembagaan dalam Pengelolaan Desa Wisata Pulau Semambu.**

Namun, secara umum, kelembagaan Desa Wisata Pulau terdapat struktur yang terdiri dari dewan penasihat, dewan pembina yang secara langsung dipegang oleh pemerintah Desa Pulau Semambu. Selain itu terdapat juga penanggung jawab kegiatan, sekretaris, bendahara, serta masing-masing penanggung jawab kegiatan program.

**1.3 Terciptanya Kegiatan dan Manfaat bagi Masyarakat**

Adapun manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat antara lain masyarakat petani mendapatkan harga jual yang lebih dari harga pasar setelah hasil kebun dan panen mereka dimanfaakan untuk kegiatan program, seperti memetik sayur, memanen buah, dan lain sebagainya. Selain itu, para pedagang yang membuka lapak atau warung juga merasakan manfaat dari kedatangan pengunjung. Tak jarang juga para pengelola mengambil dan memesan snack dari usaha masyarakat sekitar dalam kegiatan program.

Namun, secara keseluruhan dari kegiatan dan manfaat usaha masyarakat yang muncul, pengelola hanya memfokuskan pada kegiatan program di Desa Wisata Pulau Semambu. Padahal Desa Pulau Semambu memiliki potensi produk usaha wisata yang banyak bisa dimunculkan mulai usaha souvenir, *homestay* maupun usaha kuliner lokal, seperti keripik sayur,keripik buah, dll. Walaupun prioritas pembangunan diarahkan untuk pengelolaan daya tarik wisata, seharusnya produk usaha lainnya tetap dapat dimunculkan karena dalam sebuah desa wisata semua produk wisata dapat saling terkait satu sama lain. Dengan semakin banyaknya produk usaha yang dapat dimunculkan, maka memberikan banyak alternatif pilihan kepada wisatawan atau pengunjung untuk menikmati sebuah produk desa wisata. Selain itu dengan semakin banyaknya produk yang muncul, terlibat dalam menikmati manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata yang ada di Desa Wisata Pulau Semambu.

**1.4 Pengelolaan Berwawasan Lingkungan**

Keberhasilan dalam pengembangan pariwisata pada awalnya sering diukur dengan besarna perolehan devisa, namun dimasa sekarang konsep tersebut tidak relevan lagi seiring dengan berkembangnya isu kepentingan lingkungan. Secara konseptual, pariwisata berkelanjutan didasari oleh pemberdayaan masyarakat, sosial, ekonomi yang mampu memunculkan tumbuhnya kualitas sosiokultural, ekonomi, serta menjamin kelestarian dalam lingkungan [18]. Selain itu, model wisata desa yang berwawasan lingkungan biasanya tidak memiliki pengaruh bahaya di dalam lingkungannya karena bersifat tidak merubah budaya dan adat istiadat setempat tetapi meningkatkan potensi yang ada menjadi memiliki nilai jual untuk mendatangkan para wisatawan berkunjung serta melengkapinya dengan sarana dan prasarana pendukung guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan pengamatan penulis, pengelolaan daya tarik wisata Desa Pulau Semambu sudah mulai diarahkan ke pembangunan berwawasan lingkungan. Hal ini dibuktikan oleh pihak pengelola yang memperhatikan daya dukung lingkungan dengan melakukan pembangunan memanfaatkan fasilitas yang ramah lingkungan, seperti hiasan warna-warni dari botol dan ban bekas. Disini ang patut menjadi perhatian adalah bahwa Desa Pulau Semambu harus dapat terus konsisten melakukan pengelolaan lingkungan. Konsistensi tersebut diuji seiring semakin banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung. Inovasi dan kreatifitas harus selalu digali agar pengunjung tidak mengalami kejenuhan dalam menikmati keindahan dan keasrian Desa Pulau Semambu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan CBT dalam pengelolaan Desa Wisata Pulau Semambu didasarkan oleh partisipasi masyarakat lokal, kelembagaan desa wisata, terciptanya kegiatan dan usaha dari masyarakat, serta pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut dapat dipetakan pada gambar berikut ini:

**Gambar 5. Penerapan CBT pada Pengelolaan Desa Wisata Pulau Semambu.**

1. **Peran Stakeholders dalam Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Pulau Semambu**

Dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan, sebagaimana halnya pembangunan di sektor lainnya, pada hakikatnya melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada dan terkait. Pemangku kepentingan tersebut meliputi tiga pihak yaitu: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, dengan adanya masing-masing peran dan fungsinya masing-masing [6].

Kelembagaan tersebut diharapkan turut berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Karena pengembangan pariwisata merupakan upaya yang sangat kompleks yang perlu melibatkan semua stakeholders. Karena kesinergisan antara kelembagaan formal dan informal dapat menjadikan pariwisata menjadi lebih terorganisir serta dapat meminimalisir dampak negatif dari pariwisata. Kelembagaan yang baik dalam sistem pengelolaan tidak lupa didukung oleh sosialisasi dan kontrol yang baik sehingga kelembagaan dapat berjalan efektif [19].

* 1. **Peran Masyarakat sebagai Pelaku**

Menurut Marine National Sanctuaries, masyarakat tradisional dan adat memainkan peran utama dalam melestarikan keanekaragaman hayati, yang berkaitan dengan partisipasi, penggunaan lahan dan sumber daya, dan demokrasi dalam konteks pengembangan pariwisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam semua tahap perencanaan, termasuk penilaian sumber daya, mengidentifikasi masalah, dan mampu mendefinisikan tindakannya [20].

Senada dengan itu, Wearing menjelaskan bahwa sukses atau keberhasilan jangka panjang suatu industri pariwisata sangat tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas lokal [21]. Karena berkaitan dengan masyarakat yang merupakan kumpulan orang yang didalamnya hidup bersama dalam waktu yang cukup lama dan didalamnya terdapat interaksi sosial. Interaksi tersebut menciptakan nilai, norma, dan kebudayaan bagi kehidupan mereka [22]. Maka dari itu, dengan adanya partisipasi masyarakat setempat yang lebih mengetahui tentang daerah mereka sendiri dapat menjadikan objek wisata berjalan dengan lancar dan pastinya masyarakat akan merasa diikut sertakan dalam setiap kegiatan pariwisata tersebut.

Masyarakat Desa Pulau Semambu, khususnya para pemuda memiliki peran besar dalam melakukan perintisan desa wisata dan pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Pulau Semambu. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi masyarakat selalu terlibat sesuai tugas dan porsinya masing-masing. Perjalanan masyarakat dalam melakukan pengelolaan daya tarik wisata berjalan lambat. Hal ini dibuktikan selama munculnya proses perencanaan dari tahun 2017 sampai tahap evaluasi saat ini mereka masih berfokus pada satu daya tarik wisata. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembangunan yang murni menggunakan pendekatan masyarakat sebagai subjek yang harus mengakomodir ide dan kebijakan dari banyak pihak masyarakat sehingga penentuan keputusannya menjadi lama. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat beserta pengelola perlu membentuk sistem pengambilan keputusan yang lebih efisien dan lebih terarah agar pengelolaan daya tarik wisata dapat berjalan lebih cepat dan manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata dapat merata dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Wisata Pulau Semambu.

**2.2 Peran Pemerintah sebagai Fasilitator**

Pada dasarnya pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan pariwisata biasanya bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan [23]. Dari pengertian tersebut, diharapkan pemerintah harus mampu menjadi fasilitator bagi Pokdarwis baik dari segi memberikan pelatihan maupun dari segi dana dan permodalan.

Namun faktanya pemerintah belum sepenuhnya terlihat dalam pengembangan Desa Wisata Pulau Semambu ini. Padahal seharusnya pemerintah memberikan support lebih agar semangat masyarakat dapat terus terpupuk dan memiliki kemampuan dalam mengelola daya tarik wisata, sehingga Desa Wisata Pulau Semambu mampu membuat pengelolaannya dapat terus berkelanjutan. Pemerintah disini baik pemerintah Desa Pulau Semambu maupun pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

**2.3 Peran Swasta sebagai Pengembang/ Investor**

Swasta dalam hal pengembangan desa wisata adalah pihak luar yang melihat wisatawan dalam suatu destinasi sebagai

suatu peluang untuk mendatangkan keuntungan dengan jalan menyediakan produk dan jasa dalam menunjang atau mengakomodasi kegiatan berwisata dan untuk menjamin kepuasan wisatawan. Biasanya swasta sebelumnya melakukan kerjasama dengan pihak pengelola wisata.

Disamping itu, sektor swasta dalam menjalankan perannya diharapkan mempunyai kemampuan dalam merespon terhadap kebutuhan masyarakat secara cepat dan efisien bisa lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan operasional terutama dalam produksi dan distribusi pelayanan publik. Untuk pelayanan publik tertentu yang bersifat lokal, unik dan spesifik maka masyarakat akan bisa berperan secara efektif dibandingkan dengan pemerintah dan swasta [24]. Semakin besarnya kemampuan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memusatkan perhatiannya pada fungsinya yang lebih strategis sebagai regulator, fasilitator dan promotor pelayanan publik.

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran swasta dalam pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Pulau Semambu masih kecil. Hal ini disebabkan karena kontribusi Pokdarwis serta masyarakat lokal yang besar karena telah adanya kesadaran kolektif bersama sehingga kesempatan untuk investor menjadi kecil. Di satu sisi hal ini menunjukkan bahwa kekuatan pengaruh masyarakat besar dalam pengelolaan daya tarik wisata yang ada. Tetapi disisi lain perkembangan pengelolaan yang ada akan berjalan lambat karena bertumpu pada ide dan gagasan masyarakat serta *crew* yang memiliki banyak kepala dalam pengambilan keputusan. Namun menurut pengelola, pihak yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Pulau Semambu membuka kesempatan yang luas pada swasta dengan pertimbangan tetap menguntungkan pihak masyarakat.

1. **Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Pulau Semambu**

Strategi dapat diartikan sebagai rencana atau siasat yang digunakan untuk mencapai maksud tertentu. Selain itu, strategi juga diartikan sebagai upaya-upaya atau tindakan-tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu, dimana tindakan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar [25].

Namun tentunya di dalam pelaksanaan strategi terdapat potensi dan kendala yang dihadapi. Potensi adalah sesuatu hal yang dijadikan sebagai bahan atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang akan dilakukan manusia maupun yang dilakukan melalui tenaga mesin yang dalam pengerjaannya potensi dapat juga diartikan sebagai sumber daya yang ada di sekitar [26]. sedangkan kendala adalah suatu hambatan yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.

Berdasarkan analisis situasi pada Desa Wisata Pulau Semambu dapat disarikan menjadi beberapa potensi, keunggulan dan permasalahan yang dihadapi para pengelola antara lain sebagai berikut.

* 1. **Potensi dan keunggulan Desa Wisata Pulau Semambu**
* Tempatnya strategis untuk dijadikan objek wisata dan refreshing;
* Kondisinya relatif masih alamiah dan asri;
* Potensi pasar atau pengunjung cukup besar;
* Potensi dikembangkannya wisata dengan paket agrowisata;
* Adanya dukungan dari masyarakat sekitar
* Adanya promosi tersendiri dari pengelola, masyarakat, dan pengunjung.

**3.2 Permasalahan dan Kendala Desa Wisata Pulau Semambu**

* Kurangnya sarana dan prasarana sebagai daya tarik dan penunjang wisata;
* Kurangnya promosi dan variasi outbound Desa Wisata Pulau Semambu;
* Kurangnya pengelolaan wisata dengan baik akibat jumlah dan kualifikasi *crew* yang masih terbatas;
* Masih terbatasnya ide untuk menambah bisnis pelengkap dan penunjang Pariwisata Desa Wisata Pulau Semambu.

Berdasarkan potensi, keunggulan dan kelemahan Pariwisata Desa Wisata Pulau Semambu, maka solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah serta untuk pengembangannya dapat menggunakan strategi pengembangan yang berbasis pendekatan *Community Based Tourism* sebagai berikut.

* Penguatan lembaga/institusi pengelola Desa Wisata Pulau Semambu
* Meningkatkan koordinasi antara BUMDes dengan Pemerintah dan kelompok masyarakat
* Penetrasi dan memperluas pasar via peningkatan promosi wisata
* Meningkatkan sarana dan prasarana
* Peningkatan kemampuan SDM masyarakat desa
* Meningkatkan variasi jasa Pariwisata pelengkap dan penunjang

**KESIMPULAN**

Konsep CBT yang diterapkan untuk mencapai pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Desa Pulau Semambu dipertahankan dalam bentuk partisipasi masyarakat lokal, pembentukan kelembagaan desa wisata, pengelolaan daya tarik wisata berwawasan lingkungan dan terciptanya kegiatan usaha masyarakat. Pengelolaan daya tarik wisata di Desa Wisata Pulau Semambu juga seharusnya melibatkan seluruh *stakeholders* atau pemangku kepentingan pariwisata seperti pemerintah dan pihak swasta agar menciptakan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata Desa Pulau Semambu yang berkelanjutan.

Desa Wisata Pulau Semambu juga memiliki potensi yang sudah cukup baik untuk dikembangkan, diantaranya kondisi masih relatif alamiah dan asri, potensi dikembangkannya wisata dengan program paket agrowisata, serta adanya dukungan yang sangat tinggi dari para pemuda dan masyarakat sekitar. Namun pengelolaan Desa Wisata Pulau Semambu masih mengalami beberapa kendala seperti masih kurang bantuan dana dari pemerintah lokal serta kurangnya sarana dan prasarana sebagai daya tarik wisata. Selain itu kurangnya pengelolaan wisata dikarenakan jumlah *crew* yang terbatas dan masih terbatasnya ide untuk menambah bisnis pelengkap dan penunjang pariwisata Desa Wisata Pulau Semambu.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni dalam pembuatan konsep perencanaan dan pengelolaan sebaiknya dibuat secara tertulis dan disepakati bersama agar target yang dicapai jelas. Selain itu, pertemuan antar *crew* haruslah diagendakan agar koordinasi satu sama lain dapat terus terjalin dengan baik. Selanjutnya pemerintah lokal harusnya memberikan bantuan baik berupa dana dan sosialisasi dalam bentuk pendampingan rutin yang dilakukan ke Desa Wisata Pulau Semambu untuk melihat sejauh mana kegiatan pengelolaan dan pengembangan desa wisata berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Pulau Semambu dan pengelola wisata Desa Wisata Pulau Semambu beserta masyarakat Desa Pulau Semambu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] D. W. Susyanti, “Potensi Desa melalui Pariwisata Pedesaan,” *Ekon. dan Bisnis*, vol. 12, no. 1, pp. 33–36, 2013, doi: 10.1152/ajpheart.00083.2011.

[2] S. Priasukmana and R. M. Mulyadin, “Pembangunan desa wisata : Pelaksanaan undang-undang otonomi daerah,” *Info Sos. Ekon.*, vol. 2, no. 1, pp. 37–44, 2013.

[3] F. Zakaria and D. Suprihardjo, “Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan,” *Tek. Pomits*, vol. 3, no. 2, pp. C245–C249, 2014, doi: 2337-3520.

[4] M. A.J, *Kepariwisataan dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

[5] S. S. Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

[6] Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Pedoman Pokdarwis,” p. 52, 2012.

[7] B. Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2013.

[8] N. Komariah, E. Saepudin, and P. M. Yusup, “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal,” *J. Pariwisata Pesona*, vol. 3, no. 2, pp. 158–174, 2018, doi: 10.26905/jpp.v3i2.2340.

[9] D. S. Nugroho, “Community Based Tourism Tantangan Dusun Nglepen dalam Pengembangan Desa Wisata,” *J. Pariwisata*, vol. 5, no. 1, pp. 42–55, 2018, doi: 10.31311/par.v5i1.3217.

[10] A. M. Purnamasari, “Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan,” *J. Reg. City Plan.*, vol. 22, no. 1, pp. 49–64, 2011.

[11] D. Weaver, “Community-based tourism as strategic dead-end,” *Tour. Recreat. Res.*, vol. 35, pp. 206–208, 2010.

[12] Koentjoro, “Pelacuran: Sebuah Problema Sosial Multiperspektif,” *Anal. Pariwisata*, vol. 7 N0 2, p. 22, 2006.

[13] L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Roskadarya., 2006.

[14] A. S. Najih, Mokh., Fifik Wiryani, Sirajuddin, “Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah,” in *YAPPIKA*, 2006.

[15] H. S. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, dan Good governance 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

[16] E. A. Rubiantoro and R. Haryanto, “Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Upaya Penghijauan pada Kawasan Hunian Padat di Kelurahan Serengan - Kota Surakarta,” *J. Pembang. Wil. Kota*, vol. 9, no. 4, p. 416, 2013, doi: 10.14710/pwk.v9i4.6679.

[17] J. Triambodo, S., & Damanik, “Analisis Strategi Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi di Desa Wisata Kerajinan Tenun Dusun Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, DIY,” 2015.

[18] H. S. A. Putra, *Potensi dan Prospek Pengembangan Desa Wisata di D.I.Yogyakarta, makalah dalam Pembinaan Bagi Pengelola Objek Wisata*. 2000.

[19] T. O. S. Aulia, “Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kampung Kuta,” Institut Pertanian Bogor, 2010.

[20] “Understanding Tourism Stakeholder (Stakeholder Paricipation), Tanzania Coastal Tourism Situation Analysis,” *Natl. Mar. Sanctuaries*, 2001.

[21] S. Wearing, *Volunteer Tourism: Experiences That Make a Difference*. Sydney: CABI, 2001.

[22] B. Burhan, *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

[23] M. T. Muh Nurdin, St Nurmaeta, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa,” *Ilmu Pemerintah.*, vol. Vol. IV No, 2014.

[24] A. Dwiyanto, *Penduduk dan Pembangunan*. Aditya Media, 1996.

[25] J. S. dan S. M. Z. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

[26] Kartasapoetra, *Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.